

Evaluasi Smart Governance di Kabupaten Bandung

Apit Yuliman Ermaya¹, Purnomo Yustianto², Ashwin Sasongko Sastrosubroto³

Program Studi Magister Teknologi Informasi, Universitas Langlangbuana^{1,2,3}

¹apit.ppak20@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengulas evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui Level kondisi *smart governance* Kabupaten Bandung saat ini. Penelitian dilakukan dengan metode campuran dengan pendekatan kualitatif, dan kuantitatif berdasarkan konsep *smart governance* dan menurut pendapat beberapa ahli yang disesuaikan dengan kondisi pemerintahan kabupaten Bandung, mencakup 3 variabel utama dari dimensi *smart governance* yaitu: partisipasi masyarakat, infrastruktur layanan, serta transparansi pemerintah. Alat ukur yang digunakan adalah dengan mengekstrak indikator-indikator yang sering digunakan oleh penggiat *smart city*, serta peraturan pemerintah yang berlaku, yang dijadikan suatu kriteria berupa variabel, indikator, dan parameter penilaian. Adapun hasilnya menunjukkan skor 80. Hal ini menunjukkan bahwa *Smart Governance* Pemerintah Kabupaten Bandung masuk dalam kategori *Integrated*.

Kata kunci: *Smart Governance*, Indikator, Kabupaten Bandung

I. PENDAHULUAN

Saat ini *Smart city* menjadi sebuah acuan standar yang populer sebagai konsep pengembangan kota/tempat tinggal untuk masa depan dan telah menjadi istilah yang sangat populer di masyarakat dunia secara luas, hingga saat ini belum ada definisi *smart city* yang benar-benar absolut, oleh karena itu banyak para ahli yang berpendapat mengenai *smart city* secara berbeda. Berikut ini definisi *smart city* dan konsepnya, dari 2 (dua) orang ahli, yaitu: 1. *Smart City* adalah kota pintar yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan modal manusia dan sosial serta institusi publik untuk mendinamisasi pembangunan ekonomi, sosial lingkungan, dan budaya.[1] 2. *Smart City* adalah sebuah kota yang menggabungkan konsep digital, natural dan sosial sehingga terbentuknya peningkatan ekonomi, infrastruktur kota yang baik, lingkungan yang bersahabat transportasi, dan kehidupan yang nyaman. [2]

Implementasi *smart city* mencakup seluruh aspek kehidupan di perkotaan, namun tidak ada model tunggal yang baku dan cocok untuk diterapkan melainkan disesuaikan dengan kondisi kota itu sendiri, sehingga dalam upaya implementasinya, beberapa tokoh mengkategorikan *smart city* ke dalam beberapa dimensi (parameter) yang berbeda-beda [3], beliau merupakan salah satu tim ahli yang tergolong sebagai pelopor atau tim ahli generasi pertama yang mengkategorikan *smart city* ke dalam 6 (enam) dimensi, yaitu: *smart economy*, *smart people*, *smart governance*, *smart mobility*, *smart environment*, dan *smart living*.

Smart Government

Smart Government secara bahasa berarti pemerintahan cerdas, yang sekaligus merupakan salah satu bagian terpenting untuk mewujudkan penerapan konsep kota cerdas. Pemerintahan cerdas tidak mengabaikan kota cerdas [4]. Sebaliknya, pemerintah yang cerdas memimpin pengembangan kota pintar, sementara pemerintah menggunakan kota pintar sebagai wilayah praktiknya (kolaborasi dan pengujian produksi bersama layanan, dll. *Smart Government* adalah sumber dari pada *smart public service*, dari pemerintahan pada kota tersebut serta partisipasi dari masyarakat, selain itu *Smart Governance* berkaitan dengan pemerintahan pada kota pintar, dengan pemerintahannya mengelola serta menerapkan suatu kebijakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memudahkan penggunaan kelengkapan, efektifitas, efisiensi dan keterhubungan berkecepatan tinggi yang berperan aktif berpartisipasi dan bekerjasama dengan stakeholders. [5]

Smart governance merupakan fondasi dasar dari pengembangan konsep *smart city*. [6] *Smart governance* berperan sebagai inisiasi serta mesin penggerak seluruh elemen *smart city*. Layaknya definisi dari *smart city* yang sangat luas, definisi *smart governance* banyak dikemukakan oleh para ahli. Berikut merupakan definisi *smart governance* dari 2(dua) orang ahli, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1
DEFINISI SMART GOVERNANCE DARI BEBERAPA AHLI

No	Definisi	Kata Kunci
1	merangkum faktor-faktor/prinsip-prinsip tata kelola cerdas yang ditemukan dalam literatur, yang meliputi: kolaborasi, kepemimpinan dan pendukung, partisipasi dan kemitraan, komunikasi, pertukaran data, layanan dan penerapan, akuntabilitas dan transparansi. [7]	Kolaborasi, Kepemimpinan dan pendukung, Partisipasi dan kemitraan, Komunikasi, pertukaran data, layanan, dan transparansi
2	<i>Smart governance</i> dapat, melalui interaksi antara teknologi, masyarakat, kebijakan, praktik terbaik, sumber daya, sosial, norma dan informasi, mendukung tata kelola kota	Penggunaan ICT, Tata kelola birokrasi efektif

secara efektif menuju smart city. [8]
--

Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang tengah fokus dan gencar terhadap penerapan *smart city*, yang sejak tahun 2017 telah mengikuti gerakan 100 *Smart City* di Indonesia, pada tahun 2019, Bupati Bandung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2019, Tentang *Master Plan Smart City* Kabupaten Bandung, dalam Bab I, Pasal 1 dimuat pengaturan mengenai *Smart City* Kabupaten Bandung, dalam menyusun strategi pembangunan *Smart City* dengan berdasarkan pada 6 (enam) pilar, yang merupakan komponen utama dalamnya. Adapun ke-6 pilar tersebut merupakan dimensi *Smart City* Kabupaten Bandung, yaitu: (1) *Smart Governance* (2) *Smart Branding*, (3) *Smart Economy*, (4) *Smart Living* dan (5) *Smart Society*

Fenomena

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam menunjang aktivitas layanan publik telah menerapkan *E-Government*, namun dalam penyelenggaraan sebagai pemerintahan yang berbasis digital atau secara online pada kenyataannya masih terdapat masalah antara lain; penerapan e-government dalam pelayanan publik di Kabupaten Bandung belum berjalan secara massif, karena beberapa faktor seperti halnya faktor wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rural pedesaan yang terdiri dari 31 kecamatan dan kondisinya cenderung memiliki ruang geografis berupa perbukitan, hutan, serta hamparan sawah dan ladang yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi, ditengah-tengah penyebaran penduduk yang terletak saling berjauhan satu sama lain. [9] Begitu pula halnya, dengan infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai terkhusus di beberapa kecamatan seperti: Rancabali, Kertasari, Pacet dan Arjasari. Adapun yang masih menjadi kendala lainnya yang ditemui yakni beberapa aplikasi layanan publik belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu faktor Sumber daya Manusia/SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK belum optimal [10]. Karena itu dalam penelitian ini difokuskan pada evaluasi *Smart Governance*, berupa tingkat pencapaian (maturity level) di kabupaten Bandung.

II. METODE

Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi pada penelitian ini berfokus pada evaluasi proses, suatu evaluasi yang menggunakan pendekatan evaluasi semu, yang memiliki sifat menilai berdasarkan parameter tertentu yang telah disepakati dan seringkali digunakan sebagai metode monitoring dalam membandingkan kondisi nyata dengan kondisi ideal (rencana). Parameter yang digunakan penelitian ini dilakukan dengan analisis isi pada berbagai regulasi dan teori ada.

Metode Analisis Data

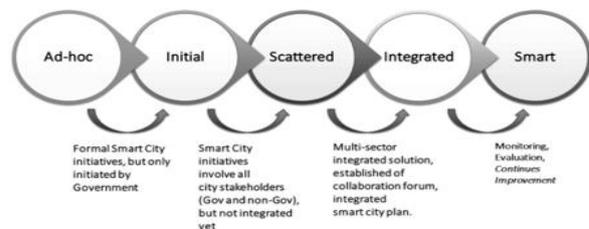
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil pengumpulan di lapangan untuk dilakukan sintesa dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. [11] Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis isi (*Content analysis*), skoring, analisis deskriptif (kualitatif dan kuantitatif).

Content Analysis (Analisis isi)

Analisis isi merupakan Teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi atau ditiru dan shahih datanya dengan memperhatikan konteksnya [12]. Analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks [13]. Analisis isi dalam penelitian ini digunakan dengan merangkum teori-teori dari para pakar yang nantinya digunakan dalam merumuskan variabel dan parameter evaluasi *smart governance* Kabupaten Bandung. Analisis isi ini digunakan untuk memperoleh instrument evaluasi *smart governance* yang lebih baik lagi yang dihasilkan dari ekstraksi teori dari para pakar yang disesuaikan dengan kondisi eksisting wilayah. Penyusunan variabel dan parameter menggunakan analisis isi dinilai akan lebih baik dikarenakan tidak bertumpu pada satu teori.

Analisis Skoring

Analisis skoring evaluasi *smart governance* mengacu pada PerMen PANRAB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE, PerMen PANRAB No.59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta penelitian [14] tentang evaluasi Tingkat kematangan *Smart Governance* di Kota Bandung. Penilaian dilakukan dengan mengkategorikan setiap parameter ke dalam lima level capaian yang memiliki nilai berbeda pada setiap capaian levelnya. Dalam analisis skoring digunakan pula *framework* dari Garuda *Smart City Framework* untuk mengukur sejauh mana Tingkat penerapan *smart city* di Kabupaten Bandung dilihat melalui dimensi *smart governance*. Penilaian ini dilakukan setelah hasil akhir setiap variabel diketahui dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan total skor akhirnya.



Gambar. 1 Maturity Level [15]

Tingkat Implementasi smart city dalam Garuda *Smart City Framework* yang dikembangkan oleh *Smart City and Community Innovation Center (SCCIC, Institut of*

Technology Bandung. GSCF diadopsi oleh *Association of Indonesian Smart Initiative (APIC)* sebagai model untuk *Smart City* Indonesia [15]. terdiri dari 5 (lima) level, yaitu *ad hoc, initial, scattered, integrated, dan smart.*

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dan dokumen. Hasil dari analisis deskriptif ini kemudian diolah kembali ke dalam bentuk angka yang kemudian digunakan dalam analisis skoring untuk menghasilkan kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan. Analisis deskriptif digunakan pula dalam mendeskripsikan *analisis skoring* yang menunjukkan sejauh mana pencapaian setiap indikator.

Evaluasi Smart Governance

Dalam penelitian ini, evaluasi *smart governance* di Kabupaten Bandung menggunakan analisis isi yang merangkum baik dari peraturan-peraturan yang berlaku / terkait dan teori dari para pakar yang nantinya digunakan dalam merumuskan/menyusun yang diawali dengan penentuan kriteria berupa variabel, indikator, dan parameter penilaian evaluasi. Penentuan kriteria tersebut dengan mengekstrak (menyaring/mencampur) indikator-indikator yang sering digunakan oleh penggiat *smart city* dalam mengevaluasi *smart governance*. Analisis isi digunakan untuk memperoleh instrument evaluasi *smart governance* yang lebih baik lagi yang dihasilkan dari ekstraksi teori dari para pakar yang disesuaikan dengan kondisi eksisting wilayah, dan ini merupakan hasil dari penggabungan beberapa instrumen evaluasi yang digunakan oleh para penggiat *smart city*.

Hasil ekstraksi ini kemudian dijadikan sebagai indikator penilaian pada analisis skoring, yang selanjutnya menghasilkan tolok ukur capaian secara umum maupun secara khusus setiap indikatornya yang kemudian digunakan sebagai standar *smart governance*, seperti pada tabel 2.

TABEL 2.
INDIKATOR SMART GOVERNANCE
BERDASARKAN PAKAR DAN DOKUMEN
TERKAIT SMART GOVERNANCE

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	<i>Smart governance</i> [16]	Partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan Pelayanan umum dan sosial Tata Kelola yang transparan	
2	<i>Smart governance</i> [17]	1. <i>Online Service</i> 2. <i>Open</i>	a. Prosedur <i>online</i> b. Pembayaran tunjangan elektronik a. <i>Open data</i>

		management 3. <i>Infrasructure</i>	b. <i>Open apps</i> c. Privasi a. Jangkauan <i>wifi</i> b. Jangkauan <i>broad band</i> c. Jangkauan sensor d. Operasi keselamatan dan kesehatan terpadu
3	<i>Smart governance</i> [18]	1. Jumlah universitas dan pusat riset dalam sebuah kota 2. Ketersediaan layanan <i>e-government</i> 3. Persentase rumah dan akses internet di rumah 4. Persentase penggunaan <i>e-government</i> oleh masyarakat	
4	<i>Smart governance</i> [19]	1. Kebijakan publik 2. Tata Kelola Birokrasi 3. Pelayanan Publik	
5	SPBE [20]	1. Kebijakan Internal SPBE	1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE a. Tim pengarah SPBE b. Inovasi proses bisnis terintegrasi c. Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah d. Anggaran dan Belanja TIK e. Pengoperasian Pusat Data f. Integrasi Sistem Aplikasi g. Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai 2. Kebijakan internal layanan SPBE Layanan Naskah Dinas Layanan Manajemen Kepegawaian Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Layanan Manajemen Keuangan

			Layanan Manajemen Kineja f. Layanan Pengadaan g. Layanan Pengaduan Publik h. layanan Dokumentasi Hukum Indikator i. Layanan <i>Whistle Blowing</i> Sistem/pengaduan i.Layanan Publik Instansi Pemerintah				c.Layanan <i>Whistle Blowing System</i> d.Layanan Publik Instansi Pemerintah
		Tata Kelola	1.Kelembagaan a. Tim pengarah SPBE Instansi Pemerintah b. Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi 2.Strategi dan Perencanaan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah Anggaran dan Belanja TIK 3.Teknologi Informasi dan Komunikasi a. Pengoperasian Pusat Data b. Integrasi sistem, Aplikasi c.Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	6	<i>Smart Governance</i> [21]	Partisipasi dalam pengambilan keputusan Pelayanan umum & sosial serta tata Kelola yang transparan	1.Jumlah dewan kotaper1000 penduduk 2.Proporsi anggota Wanita dalam keanggotaan dewan kota 3.Jumlah partai politik per 1000 penduduk 1.Jumlah anak yang dapat mengakses Taman Kanak-Kanak (usia 0-6 tahun) 2.Total APBD perkapita 3. Transparansi keuangan
		Layanan	1.Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik a. Layanan Naskah Dinas b. Layanan Manajemen Kepegawaian c.Layanan Manajemen Perencanaan d.Layanan Manajemen Penganggaran Layanan Manajemen Keuangan Layanan Manajemen Kinerja Layanan Pengadaan 2.Layanan Publik Bebasis Elektronik a.Layanan Pengaduan Publik b.Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7	<i>Smart governance</i> [22]	Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per100.000 penduduk Persentase Layanan Kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring Rata-rata waktu respon terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui system penyelidikan non darurat kota (hari) Rata-rata waktu henti infrastruktur teknologi informasi (TI) kota	1.Jumlah total kunjungan portal data terbuka kota 1/100.000 dari Total populasi penduduk kota Jumlah total layanan kota yang ditawarkan kepada orang dan bisnis melalui antarmuka internet yang terpusat. Jumlah total layanan kota yang ditawarkan oleh kota Jumlah total jam dari panggilan awal/pengajuan formulir yang diambil untuk menanggapi semua pertanyaan yang dibuat melalui system non-darurat kota. Jumlah total pertanyaan yang diterima oleh system non-darurat kota Jumlah jam ketika infrastruktur TI kota tidak tersedia karena insiden. Jumlah total insiden yang menyebabkan pemadaman infrastruktur TI

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Big dan open data merupakan sebuah isu penting yang harus dihadapi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat [23]. Kedua hal tersebut akan memunculkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dapat mengidentifikasi persoalan

yang ada di sekitar mereka, sementara itu pemerintah dalam hal ini mendapatkan masukkan serta berusaha memecahkan persoalan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat. tentunya hal ini akan berjalan dengan baik apabila adanya system manajemen data yang baik.

Penyelenggaraan layanan publik berbasis *online* merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan *smart city*. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Layanan publik berbasis *online* di Kabupaten Bandung. Berikut yang disebut *simasda*, Portal ini merupakan wadah untuk mengakses informasi yang diperlukan oleh publik, dalam hal ini secara data informasi Kabupaten Bandung sudah mulai berkembang lebih baik, dimana data yang diperlukan tidak hanya di arsipkan dalam bentuk kertas melainkan juga disimpan di aplikasi virtual yang bisa diakses publik dengan *online*. Hasil penilaian indikator layanan publik *online* pada level 5 seperti pada tabel 3 berikut.

TABEL 3
 PENILAIAN INDIKATOR LAYANAN PUBLIK ONLINE

Indikator	Parameter	Pertanyaan	Skor
Layanan publik <i>online</i>	Persentase ketersediaan layanan publik <i>online</i>	Dari 27 OPD yang ada di kabupaten Bandung, semua telah menyediakan Website Layanan publik <i>Online (Observasi, 2023)</i> . Pelayanan publik <i>online</i> Kabupaten Bandung berjumlah sekitar 100 aplikasi, dimana ini masih terus sedang dikembangkan untuk disederhanakan. Bersama wawancara Bapak Andri, M. Com selaku Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kabupaten Bandung	
Level 5	Persentase Layanan Publik <i>online</i> >80%		100

Open Data

Open data merupakan kumpulan data yang digunakan secara bebas, dipakai dan didistribusikan ulang oleh siapa saja [24] Sesuai dengan pernyataan tersebut ketersediaan portal open data bagi masyarakat Kabupaten Bandung merupakan peyelesai permasalahan perkotaan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyediakan portal open data yang dapat diakses melalui *website satu data bandungkab.go.id*. Open data Kabupaten Bandung telah mengintegrasikan berbagai data dari berbagai instansi dan OPD Kabupaten Bandung. Open data Kabupaten Bandung telah memiliki 5.709 data set, terbagi dalam 11 kelompok, yang terdiri dari 37 organisasi pemerintahan. Pengunjung portal open data Kabupaten Bandung dapat mencari data yang dibutuhkan dengan cara mengetikkan kata kunci data pada bar pencarian. (di satu databandungkab.go.id).

Berdasarkan (ISO- 3712,2019) tentang Indikator untuk Kota Cerdas, salah satu tolak ukur dimensi *governance* adalah Tingkat kunjungan penduduk kepada portal data terbuka yang disediakan pemerintah. Lihat tabel 4 berikut.

TABEL 4
 MEKANISME PERHITUNGAN TINGKAT KUNJUNGAN TAHUNAN PORTAL DATA TERBUKA

Jumlah total kunjungan data dibagi 1/100.000 populasi kota	Jumlah total portal terbuka dengan 1/100.000 dari	Jumlah total kunjungan portal data terbuka dibagi dengan 1/100.000 dari total populasi kota	Jumlah tahunan kunjungan daring ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk.
Jumlah total kunjungan		Jumlah	
Jumlah tahunan Kunjungan per 100.000 Penduduk = -----		-----	
----- =		(1	
/100.000) x populasi		= 1,93%	
7.044.300	7.044.300	= 192,994	
= -----	= -----	= 36,5	
3,65juta/100.000	36,5		
Note: kunjungan sampai 2023 = 7.044.300			

Sumber: (ISO-37122,2019). Analisis 2023

Berdasarkan perhitungan terhadap jumlah kunjungan portal data terbuka di atas, jumlah kunjungan penduduk Kabupaten Bandung terhadap portal data terbuka yang disediakan pemerintah adalah 10.000 kunjungan pada setiap 100.000 penduduk Kabupaten Bandung. Hal tersebut menunjukkan Tingkat kunjungan penduduk terhadap portal data terbuka baru mencapai 1,93%. Hal ini menunjukkan mayoritas penduduk Kabupaten Bandung kurang mengetahui dan memanfaatkan keterbukaan data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kependudukan

Data kependudukan merupakan data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipil [25]. Data kependudukan merupakan salah satu data dasar yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan Pembangunan suatu wilayah. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung telah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Pelayanan digital administrasi kependudukan tersebut dapat diakses melalui *website www.disdukcapil.bandungkab.go.id* dan aplikasi berbasis android & IOS, yaitu aplikasi SAKEDAP yang dapat diakses/di download di Playstore dan diunduh di

Playstore Android dan melalui link anrian.bandungkab.go.id

Kesehatan

Akses kebutuhan informasi Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan. Untuk akses kesehatan menggunakan satu pintu, yaitu melalui bandungkab.go.id.

Akses informasi ini dibutuhkan dalam pertimbangan pengambilan kebijakan dari sisi pemerintah serta kebutuhan pemenuhan hak dasar bagi Masyarakat untuk mendapatkan Kesehatan yang baik, Kabupaten Bandung telah menyediakan akses kesehatan melalui satu pintu, yaitu melalui situs bandungkab.go.id.

Pendidikan

Kabupaten Bandung melalui Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian berusaha memenuhi kebutuhan warganya dengan Solusi berupa peluncuran system *E-Learning* Kabupaten Bandung melalui website: (<https://e-learning.bandungkab.go.id>), yaitu pemanfaatan layanan teknologi informasi untuk pembelajaran. Yaitu: Virtual SCHOOL ON-line, COURSES ONLINE tutorial, bahan ajar.

Kebencanaan

Upaya Pengkab Bandung dalam memberikan Solusi terkait dengan kebencanaan adalah membagikan informasi terkait kebencanaan system informasi ini dapat dikunjungi melalui website: bpbd.bandung.go.id website, ini merupakan sarana publikasi untuk memberikan informasi dan Gambaran tentang bpbd Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas informasi.

Berdasarkan observasi dan pembahasan yang dilakukan di atas, berikut merupakan penilaian indikator open data, yang hasilnya pada level 5, seperti terlihat pada tabel6 berikut.

TABEL 5
 PENILAIAN INDIKATOR OPEN DATA

Indikator	Parameter	Temuan studi	Skor
Open Data	Ketersediaan portal open data	Sistem open data Kabupaten bandung dapat diakses melalui website data.bandungkab.go.id . Open data telah mengintegrasikan instansi dan OPD Kabupaten Bandung dan hingga saat ini terdapat 5.400 datasets yang terdiri dari 27 organisasi pemerintahan (<i>Observasi, 2023</i>).	Skor
Level 5	Ada beberapa open data yang terintegrasi, dan dapat diakses secara <i>online/realtime</i> dari mana saja.		V

Layanan Terintegrasi

Kabupaten Bandung mengintegrasikan layanan tanggap darurat bencana, darurat medis, darurat kriminal, kebakaran serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Layanan integrasi ini berupa sistem layanan 24 jam Call Center 112 yang dapat diakses gratis oleh masyarakat Kabupaten Bandung, ini merupakan suatu terobosan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sekaligus mempermudah mengingat nomor darurat yang sebelumnya terbagi pada satuan tugas masing-masing, pengintegrasian layanan ini mempermudah koordinasi pada satuan tugas terkait serta memungkinkan penanganan yang lebih cepat oleh satuan tugas terkait. Hasil penelitian diperoleh nilai pada level 5, terlihat seperti pada table 6 berikut:

TABEL 6
 PENILAIAN INDIKATOR LAYANAN TERINTEGRASI

Indikator	Parameter	Temuan studi	Skor
Layanan terintegrasi	Ketersediaan layanan yang terintegrasi dalam satu pusat operasi untuk meningkatkan <i>realtime</i> data, 1 titik untuk masing-masing: ambulans, tanggap darurat bencana, kebakaran, Polisi, cuaca dan kualitas udara.	Sudah terintegrasi di <i>Command Center</i> atau <i>Situation Room</i> -di DISKOMINFO Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, layanan terintegrasi ini sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelatihan pemanfaatan call 122 bagi petugas di Kabupaten Bandung	Skor
Level 5	Persentase ketersediaan layanan terintegrasi > 80%		V

Pusat Data

Pengoperasian pusat data memiliki peranan penting dalam menyediakan keterbukaan informasi publik dan memungkinkan pelayanan tata kelola terintegrasi, yang dapat mengurangi adanya pulau-pulau informasi yang tersebar. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu Data, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Diskominfo telah menjalankan pusat data (*data center*) yang pengoperasiannya memanfaatkan pusat data nasional untuk kanal dinas, pendidikan dan sekolah-sekolah.. Diskominfo Kabupaten Bandung telah melaksanakan pengalihan kanal yang lain dengan Pusat Data Nasional.

Penilaian parameter pengoperasian pusat data dilakukan dengan menganalisis ketersediaan pengoperasian pusat data yang disediakan. Penilaian ini dilakukan dengan mengadopsi tolak ukur dari (PerMen PANRB No.59,2020) tentang Evaluasi dan Pemantauan SPBE dan [26] dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Tingkat Kematangan *Smart Governance* di Kota Bandung”. Pada penilaian ini dilakukan klasifikasi capaian menjadi lima level dengan skor yang berbeda

pada setiap levelnya. Skor pada setiap levelnya memiliki rentang nilai 20 untuk paling rendah (level 1) dan 100 untuk level capaian tertinggi (level 5), Dimana setiap level memiliki perbedaan rentang skor 20. Hasil penilaian diperoleh nilai pada level 5, seperti terlihat pada tabel 7 berikut;

TABEL 7
 PENILAIAN INDIKATOR PUSAT DATA

Indikator	Parameter	Temuan studi	Skor
Pusat data	Ketersediaan pengelolaan pusat data	Ya, <i>data center</i> terpusat di Diskominfo dan juga Diskominfo telah memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk kanal Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah. Ke depan Diskominfo akan mengalihkan kanal yang lain untuk ke Pusat Data Nasional agar menghemat pengeluaran (Wawancara Bersama Bapak Andriselaku Petugas pengembangan Aplikasi Diskominfo Kabupaten Bandung)	
Level 5	Kinerja pengoperasian data ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.		V

Keterlibatan Komunitas

Keterlibatan masyarakat kota merupakan bentuk baru dari demokrasi yang masyarakatnya mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan bagi perkembangan mereka [23]. Masyarakat dan pemerintah akan berkontribusi cukup besar dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan publik yang transparan dan penuh tanggung jawab. Pelibatan masyarakat memberikan perspektif yang baru dari sebuah kebijakan dari sisi masyarakat itu sendiri. Keterlibatan komunitas dalam evaluasi *smart governance* dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan dan *wastle blowing system*.

Partisipasi dan Aspirasi Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Bandung telah meluncurkan berbagai aplikasi dan *website* dalam rangka memanfaatkan TIK dalam penerapan *smart city* di Kabupaten Bandung. Salah satu aplikasi yang diluncurkan Kabupaten Bandung adalah aplikasi SIMCAN. SIMCAN merupakan aplikasi *computer on-line* berbasis *web application* yang terpadu sebagai portal musyawarah Pembangunan dan perencanaan kota.

Penilaian parameter partisipasi dan aspirasi publik dilakukan dengan menganalisis ketersediaan website maupun aplikasi yang mengakomodasi partisipasi dan aspirasi publik di Kabupaten Bandung Penilaian ini dilakukan dengan mengadopsi tolak ukur yang dikembangkan oleh [26] dalam penelitian yang berjudul

“Evaluasi Tingkat Kematangan *Smart Governance* di Kota Bandung”. Pada penilaian ini dilakukan klasifikasi capaian menjadi lima level dengan skor yang berbeda pada setiap levelnya. Skor pada setiap levelnya memiliki rentang 20 untuk paling rendah (level 1) dan 100 untuk level capaian tertinggi (level5). Hasil penelitian didapat penilaian pada level 4, seperti terlihat pada tabel 8 berikut.

TABEL 8
 PENILAIAN INDIKATOR PARTISIPASI DAN ASPIRASI PUBLIK

Indikator	Parameter	Temuan studi	Skor
Partisipasi dan aspirasi publik	Ketersediaan situs web maupun aplikasi yang mengakomodasi partisipasi dan aspirasi publik	PemKab. Bandung telah memfasilitasi aspirasi dan partisipasi publik melalui website data bandungkab.go.id (<i>Wawancara Bersama Bapak Andri selaku kepala seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kabupaten Bandung</i> Selain ini PemKab. Bandung telah meluncurkan aplikasi SIMCAN yang merupakan aplikasi computer online yang berbasis web application diluncurkan pemerintah sebagai portal musyawarah Pembangunan.	
Level 4	Sistem aspirasi dan partisipasi publik dilakukan secara online sehingga dapat dilihat progresnya sejauh mana		V

Whistle Blowing System (WBS)

WBS/pengaduan adalah tindakan yang dilakukan secara individu maupun kolektif untuk memberitahukan kecurangan karyawan perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Salah satu tujuan sistem ini adalah untuk menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung, untuk ini telah dikeluarkan Perbud Kab. Bandung No.48 Tahun 2022. Mekanisme WBS Kabupaten Bandung telah terintegrasi dengan SP4N Laporan pemerintah pusat yang memungkinkan seluruh masyarakat dapat mengajukan keluhan serta aduan secara langsung melalui sosial media. website: bps.go.id/pengaduan/wbs/beranda/.

Penilaian parameter *WBS* dilakukan dengan menganalisis ketersediaan portal WBS di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Penilaian ini dilakukan dengan mengadopsi tolak ukur dari (PerMen PANRAB No. 5, 2018) dan (Fahira, 2021) dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Tingkat Kematangan *Smart Governance* di Kota Bandung.” Pada penilaian ini dilakukan klasifikasi capaian menjadi lima level dengan skor yang berbeda

pada setiap levelnya. Skor pada setiap levelnya memiliki rentang nilai 20 untuk paling rendah (level1) dan 100 untuk level capaian tertinggi (level 5), Dimana setiap level memiliki perbedaan rentang skor 20. Hasil penelitian didapat nilai pada level 4, seperti terlihat pada tabel 9 berikut.

TABEL 9.
PENILAIAN INDIKATOR *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

Indikator	Parameter	Temuan studi	
<i>Layanan whistle Blowing Sistem (WBS)</i>	Ketersediaan layanan <i>Whistle Blowing Sistem (WBS)</i>	Terintegrasi dengan SPAN Lapor Pusat, Seluruh Masyarakat dapat mengajukan Keluhan dan aduan secara langsung melalui Sosial media (Wawancara Bersama Bapak Andri, Aplikasi Diskominfo	Skor
Level 3	WBS menyediakan layanan transaksi Dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan system dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan		V

Analisis Skoring Evaluasi *Smart Governance*

Analisis skoring evaluasi *smart governance* menggunakan persentase capaian parameter yang di klasifikasikan dalam lima level. Klasifikasi penilaian didasarkan pada (PerMen PANRB No.5, 2018) tentang Pedoman Evaluasi SPBE., (PerMen PANRB No. 59, 2020) tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta penelitian tentang Evaluasi Tingkat Kematangan *Smart Governance* di Kota Bandung. Data dan informasi penilaian didapatkan dengan metode observasi indikator-indikator *smart governance* serta hasil wawancara. Evaluasi menggunakan *framework* dari Garuda *Smart City* yang mengukur sejauh mana tingkat capaian, yang dikembangkan, seperti terlihat pada tabel 10 berikut [15]

TABEL 10
ADAPTASI GSCF DALAM EVALUASI *SMART GOVERNANCE* KABUPATEN BANDUNG

Persentase pencapaian	Level	Keterangan untuk <i>smart governance</i>
0% - 20%	<i>Adhoc</i>	Belum ada inisiatif dalam pemerintahan sehingga tata kelola masih dilaksanakan secara tradisional (manual).
21%-40 %	<i>Initial</i>	Inisiatif sudah muncul, tetapi belum dilaksanakan oleh seluruh elemen pemerintahan sehingga bersifat parsial.
41%-60%	<i>Scattered</i>	Inisiatif mulai diaplikasikan seluruhnya, akan tetapi belum didukung oleh operasional dan data yang terintegrasi.

61%-80%	<i>Integrated</i>	Inisiatif sudah diterapkan seluruhnya dengan memperhatikan kolaborasi dan integrasi data yang lebih baik.
81%-100%	<i>Smart</i>	Inisiatif telah berjalan dengan pengelolaan dan integrasi data yang baik serta monitoring yang berkelanjutan untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik.

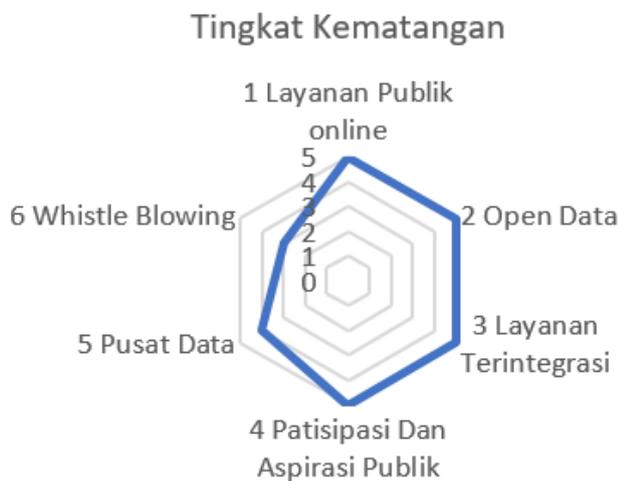
Sesuai skoring, analisis variabel, indikator, dan parameter, *smart governance* di Kabupaten Bandung masuk dalam kategori *integrated.*, terbukti skoring akhir semua parameter pada nilai **80**. Nilai ini menunjuk *smart governance* telah diterapkan seluruhnya dengan memperhatikan kolaborasi dan integrasi data yang lebih baik. Berikut merupakan tabel 11 skoring yang dilakukan pada setiap variabel, indikator, dan parameter *smart governance* di atas sebelumnya.

TABEL 11
SKORING EVALUASI *SMART GOVERNANCE* KABUPATEN BANDUNG

No	Variabel	Indikator	Parameter	Skor parameter	Skor indikator	Skor Variabel
1	Manajemen data	Layanan Publik <i>Online</i>	Persentase ketersediaan layanan publik online	80	80	
		Open Data	Ketersediaan portal Open Data	80	80	
		Pusat Data	Ketersediaan pengelolaan pusat data	80	80	
		Layanan terintegrasi	Kesediaan layanan yang terintegrasi dalam suatu pusat operasi untuk meningkatkan <i>realtime data</i> titik untuk masing-masing: ambulans, tanggapan darurat, bencana kebakaran, Polisi,	100	100	85

2	Pelibatan komunitas		Cuaca dan kualitas udara			75
		Partisipasi dan aspirasi publik	Ketersediaan situs web maupun aplikasi yang mengadopsi modasi partisipasi dan aspirasi publik	75	75	
		Layanan WBS	Ketersediaan layanan WBS (pengaduan)	75	75	
Skor Akhir 80						
Inisiatif <i>smart governance</i> sudah diterapkan seluruhnya dengan memperhatikan kolaborasi dan integrasi data yang lebih baik						

Sesuai skoring disimpulkan capaian indikator tertinggi oleh layanan integrasi dengan skor 100, sedang capaian terendah oleh layanan *wbs* serta partisipasi dan aspirasi publik. Berikut disajikan diagram *spider* yang menunjukkan capaian setiap indikator *smart governance*.



Gambar 2 Diagram Spider

IV. SIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saat ini penerapan *smart governance* Kabupaten Bandung, secara keseluruhan telah diterapkan dengan memperhatikan kolaborasi dan integrasi data yang lebih baik, sehingga mendapatkan skor akhir sebesar 80 (skoring pada Tabel 16), sehingga masuk dalam katagori *integrated*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa inisiatif *smart governance* Kabupaten Bandung

belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan karena dilihat dari keterlibatan masyarakat yang belum optimal dalam berbagai indikator, seperti Partisipasi dan Aspirasi Perencanaan Pembangunan masyarakat belum memperlihatkan partisipasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya layanan *smart governance* di Kabupaten Bandung jika dilihat dari pemanfaatan data oleh masyarakat. Selain hal itu, dapat disebabkan kurangnya literasi masyarakat terhadap teknologi dan informasi.

Dengan belum optimalnya Partisipasi dan Aspirasi masyarakat, akan berdampak pada: (1) dalam mengembangkan *smart city* umumnya, dan *smart governance* khususnya bertumpu pada pemerintah saja, (2) kebutuhan publik/ masyarakat tidak terakomodir dan (3) dapat terjadi ketidak sinkronan antara kepentingan masyarakat dengan arah dalam membangun *smart city*

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat untuk itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan untuk menjalankan arahan yang mendukung berjalannya proses pengembangan konsep *smart governance*. Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui inotivasi berbasis digitel pada layanan pemerintah dan penyediaan ruang-ruang digital bagi publik untuk berpartisipasi dalam Pembangunan.

Adapun saran bagi masyarakat untuk turut mendukung keberhasilan dan proses transformasi menuju *smart governance*. diharapkan masyarakat dapat aktif berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi yang terkait dengan pembangunan di Pemda Kabupaten Bandung melalui pembentukan forum-forum pendukung *smart governance* dan kesempatan partisipasi publik lain yang telah disediakan. masyarakat dapat dengan cara memanfaatkan fasilitas digital yang telah dibuat oleh pemerintah, yang dalam konteks ini adalah turut serta memberi masukan pada pemerintah dalam urusan Pembangunan.

REFERENSI

- [1] Kozlowki, W & Suwar, K. Smart City Dimension and Industries European Research Studies Journal Volume xxiv, Special Issue 3, 2021: 509-520
- [2] Abdoullaev, A. (2011). A Smart World: A Development Model for Intelligent Cities Cities
- [3] Rudolf Giffinger, at.all. *Smart cities-Ranking of European medium-sized cities*. C. wentre of Regional Science, Vienna UT, Oktober 2007. www.srf.tuwien.ac.at
- [4] Anthopolous, L & Reddick, C., G (2016), Smart City and Smart Government: Synonymous or Complementary?
- [5] Scholl & Al Awadhi (2016). *Smart Governance: A Cross-Case Analysis of Smart City Initiatives*. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences
- [6] Citiasia Center for Smart Nation (2015). *Smart Nation A Mastering Nation'S A to SMART CITY advancement from SMART READINESS.citiasia*.
- [7] Hourabi, H. Nam, T. Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T.A and Scholl, H.J Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences.
- [8] Bernando, Maria R.M 92017) Smart City Governance: From E-

- Government to Smart Governance. In L.C Calvalho (Eds). Handbook of Research on Entrepreneurial Development and Innovation Withi Smart Cities(pp.290-326).
- [9] Suherman, D. (2020). *E-Government* di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, (Vol 12 No.2, Desember 2020: 101-111).
- [10] bandungkab.go.id (2016) *E-Gov Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kepada Publik*.
<http://www.bandungkab.go.id/arsip/e-gov-tingkatkan-kualitas-pelayanan-pemerintah-kepada-publik>
- [11] Sugiyono (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D. Bandung, Alfabeta. 2021.
- [12] Krippendorff, K. (1980). *Content Analysis an Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills, California: Sage Publications. Ltd.
- [13] Weber (1994:9) <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/sejarah-tujuan-dan-tahapan-analisis-isi.html> diunduh tgl.3/9-2023
- [14] Fahira, V. R. (2021). Evaluasi Tingkat Kematangan Smart Governance di Kota Bandung. Institut Teknologi Bandung.
- [15] Supangkat S., H., Arman, A.A., Nugraha, R., A., Y., A. (2018). *The Implementation of Garuda Smart City Framework for Smart City Readiness Mapping in Indonesia*. Jurnal of Asia-Pacific Studies (Wiseda University).32
- [16] Giffinger, F., C Fertner, H. Kramer, R. Kalasek., N. Pichler-Milanovic, and E. Meijers E. (2007). Smart Cities Ranking of European Medium-sized Cities. Vienna Centre of Regional Science.
- [17] Cohen, B. (2012) IoMob: Blockchain-powered Internet of Mobility (IoM)
- [18] Lombardi, P., Giodarno, S Farouh, H. and Yousef, (2012). Telling the smart city performance, Innovation: The smart city performance, Innovatin: The European Journal of Social Science Search, 25:2, 137-149.
- [19] Citiasia Center for *Smart Nation* (2015). *Smart Nation A Mastering Nation'S A to SMART CITYdvancement from SMART READINESS.citiasia*.
- [20] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.5 Tahun 2018.Tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- [21] Alibegovic. D.J., Kordej-De Villa,Z and Sagovac,M. (2018).*Smart City Indicators: Can They Improve Governance in Croation Large Cities?*
- [22] SNI-ISO 37122 (2019). Perkotaan dan masysrakat berkelanjutan-Indikator untuk kota cerdas
- [23] Mellouli,S.,Luna-Reyes, l.,F, and Zhang,J,(2014). *Smart government citizen participation and open data*. Inormation Policy, 19(2014),1-4
- [24] Negara, E. S. (2021) Smart Government. Palembang: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Bina Darma Press
- [25] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- [26] Fahira, V. R. (2021). Evaluasi Tingkat Kematangan Smart Governance di Kota Bandung. Institut Teknologi Bandung.